

IMPLEMENTATION OF OVER DIMENSION AND OVER LOADING (ODOL) POLICY ON THE HULU SUNGAI UTARA ROAD SECTION (Case Study: Brigjend H. Hasan Basri Road)

Bahrul Ilmi¹ ✉, Reno Affrian², Selamat Riadi³

^{1,2,3}Program Studi Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

e-mail: ✉¹bahrulilmi245@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted: July 14, 2026

Revised: -

Accepted: August 7, 2026

Published: August 31, 2026

Kata Kunci:

implementasi kebijakan,
Over Dimension and Over
Loading (ODOL),
transportasi jalan, Van Meter
dan Horn, administrasi publik

Keywords:

*policy implementation, Over
Dimension and Over Loading
(ODOL), road
transportation, Van Meter
and Horn, public
administration*

Doi:

<https://doi.org/10.36658/datu.v3.i1.2008>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Over Dimension and Over Loading (ODOL) di ruas Jalan Brigjen H. Hasan Basri, Kabupaten Hulu Sungai Utara, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap aparat Dinas Perhubungan, Satuan Lalu Lintas Polres Hulu Sungai Utara, sopir angkutan barang, serta pengusaha angkutan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan model analisis interaktif dan menggunakan kerangka implementasi kebijakan Van Meter dan Horn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ODOL telah dilaksanakan, namun belum berjalan secara optimal. Hal ini ditandai dengan masih ditemukannya pelanggaran akibat keterbatasan sumber daya, kurang efektifnya komunikasi kebijakan, serta tekanan sosial dan ekonomi yang memengaruhi tingkat kepatuhan kelompok sasaran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ODOL memerlukan penguatan sumber daya, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat agar kebijakan dapat diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Over Dimension and Over Loading (ODOL) policy on Brigjen H. Hasan Basri Road, Hulu Sungai Utara Regency, and to identify the factors influencing its implementation. This research employs a qualitative approach with a descriptive research design. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation involving officers of the Transportation Agency, Traffic Unit of the Hulu Sungai Utara Police, freight drivers, and transport business owners. Data analysis was conducted qualitatively using an interactive analysis model and the policy implementation framework of Van Meter and Horn. The results indicate that the implementation of the ODOL policy has been carried out but has not yet operated optimally. This is evidenced by the continued occurrence of violations due to limited resources, ineffective policy communication, and social and economic pressures affecting the compliance of target groups. The study concludes that the successful implementation of the ODOL policy requires strengthening resources, improving inter-agency coordination, and increasing public awareness and compliance to ensure that the policy can be implemented effectively and sustainably.

PENDAHULUAN

Transportasi merupakan salah satu sektor fundamental dalam menunjang pembangunan ekonomi, sosial, dan pemerataan wilayah. Keberadaan sistem transportasi yang andal dan berkelanjutan berperan penting dalam memperlancar mobilitas manusia, barang, dan jasa, sehingga mampu meningkatkan efisiensi distribusi serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Di Indonesia, transportasi darat khususnya transportasi jalan raya menjadi moda yang paling dominan digunakan dalam kegiatan distribusi logistik karena sifatnya yang fleksibel, mudah diakses, dan mampu menjangkau wilayah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain seperti kereta api, laut, maupun udara. Namun demikian, tingginya ketergantungan terhadap transportasi jalan juga memunculkan berbagai permasalahan struktural, salah satunya adalah maraknya praktik kendaraan angkutan barang Over Dimension and Over Loading (ODOL). ODOL merupakan kondisi ketika kendaraan angkutan barang beroperasi dengan dimensi yang melebihi ketentuan teknis atau mengangkut muatan melampaui kapasitas yang diizinkan. Praktik ini telah menjadi persoalan nasional karena tidak hanya melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga menimbulkan dampak multidimensional, mulai dari meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas, kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan, hingga kerugian ekonomi yang harus ditanggung oleh negara dan masyarakat.

Secara normatif, pengaturan mengenai dimensi dan muatan kendaraan telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta diperkuat melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang. Regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, termasuk ketentuan mengenai ukuran kendaraan dan batas muatan. Namun, dalam praktiknya, keberadaan regulasi yang jelas belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya pelanggaran ODOL di lapangan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan realitas implementasinya.

Permasalahan ODOL juga menjadi fenomena yang nyata di tingkat daerah, termasuk di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten ini memiliki peran strategis sebagai wilayah distribusi hasil pertanian, perkebunan, perikanan, serta kebutuhan logistik masyarakat. Salah satu ruas jalan penting yang menjadi jalur utama aktivitas transportasi dan distribusi barang adalah Jalan Brigjen H. Hasan Basri. Ruas jalan ini memiliki intensitas lalu lintas yang tinggi dan sering dilalui kendaraan angkutan barang bertonase besar. Kondisi tersebut

menjadikan Jalan Brigjen H. Hasan Basri rentan terhadap kerusakan infrastruktur, terutama akibat kendaraan bermuatan berlebih.

Berbagai laporan media lokal menunjukkan bahwa kerusakan jalan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, khususnya di jalur-jalur utama, terus berulang meskipun telah dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas jalan. Retakan, lubang, dan penurunan kualitas perkerasan jalan menjadi pemandangan yang sering dijumpai dan mengganggu kenyamanan serta keselamatan pengguna jalan. Selain itu, kendaraan ODOL juga berkontribusi terhadap meningkatnya potensi kecelakaan lalu lintas dan kemacetan, terutama pada ruas jalan yang memiliki lebar terbatas dan berada di kawasan padat aktivitas masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan ODOL tidak hanya berdampak pada aspek teknis transportasi, tetapi juga menyentuh aspek keselamatan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Upaya pemerintah daerah bersama aparat kepolisian dan Dinas Perhubungan dalam menanggulangi ODOL telah dilakukan melalui berbagai bentuk kebijakan, seperti sosialisasi, edukasi kepada sopir dan pengusaha angkutan, serta kegiatan penindakan dan operasi keselamatan lalu lintas. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran ODOL masih terus terjadi. Salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut adalah pertimbangan ekonomi para pelaku usaha dan sopir angkutan, yang cenderung mengutamakan efisiensi biaya dengan mengangkut muatan sebanyak mungkin dalam satu perjalanan. Akibatnya, kepatuhan terhadap aturan dimensi dan muatan kendaraan sering kali diabaikan. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan ODOL merupakan proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dalam perspektif administrasi publik, keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kejelasan regulasi, tetapi juga oleh ketersediaan sumber daya, karakteristik dan kapasitas pelaksana kebijakan, pola komunikasi antarinstansi, sikap dan komitmen para pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Model implementasi kebijakan Van Meter dan Horn menegaskan bahwa faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan secara bersama-sama menentukan tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan di lapangan.

Berdasarkan kondisi tersebut, kajian mengenai implementasi kebijakan Over Dimension and Over Loading (ODOL) di Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini berfokus pada analisis implementasi kebijakan ODOL di ruas Jalan Brigjen H. Hasan Basri sebagai salah satu jalur strategis di wilayah tersebut. Dengan menganalisis proses implementasi kebijakan serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambatnya, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan

kebijakan ODOL di tingkat daerah. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian implementasi kebijakan publik, serta menjadi bahan masukan praktis bagi pemerintah daerah dan instansi terkait dalam merumuskan strategi pengendalian ODOL yang lebih efektif dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses implementasi kebijakan Over Dimension and Over Loading (ODOL) serta menggali pengalaman, pandangan, dan persepsi para aktor yang terlibat dalam pelaksanaannya. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual fenomena implementasi kebijakan ODOL yang terjadi di lapangan. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan fokus pada ruas Jalan Brigjen H. Hasan Basri. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa ruas jalan tersebut merupakan jalur utama transportasi dan distribusi barang yang memiliki intensitas lalu lintas angkutan barang cukup tinggi serta sering dikaitkan dengan permasalahan kendaraan bermuatan berlebih.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Informan yang dipilih merupakan pihak-pihak yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam implementasi kebijakan ODOL, meliputi aparat Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara, personel Satuan Lalu Lintas Polres Hulu Sungai Utara, sopir angkutan barang, serta pengusaha jasa angkutan dan meubel. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, laporan instansi terkait, arsip, serta pemberitaan media massa yang relevan dengan kebijakan ODOL dan kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi lalu lintas, aktivitas kendaraan angkutan barang, serta potensi pelanggaran ODOL di lokasi penelitian. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan informan untuk memperoleh informasi terkait pemahaman, sikap, dan pelaksanaan kebijakan ODOL di lapangan. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian berupa foto kegiatan, arsip kebijakan, dan dokumen pendukung lainnya.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan model analisis interaktif yang meliputi tiga tahap, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kondensasi data dilakukan dengan cara menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif untuk memudahkan pemahaman terhadap temuan penelitian. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu merumuskan makna dan temuan penelitian berdasarkan pola dan hubungan antar data yang diperoleh. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik uji kredibilitas data melalui triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan demikian, data yang dihasilkan diharapkan memiliki tingkat kepercayaan dan validitas yang tinggi.

Dalam menganalisis implementasi kebijakan ODOL, penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Horn sebagai kerangka analisis, yang meliputi enam variabel utama, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik dan pelaksana, komunikasi antarorganisasi, disposisi pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Model ini digunakan karena dianggap relevan untuk menggambarkan kompleksitas implementasi kebijakan ODOL di tingkat daerah.

PEMBAHASAN

1. Standar dan Sasaran Kebijakan Over Dimension and Over Loading (ODOL)

Standar dan sasaran kebijakan merupakan faktor utama yang menentukan arah dan tujuan implementasi suatu kebijakan publik. Dalam konteks kebijakan Over Dimension and Over Loading (ODOL), standar kebijakan telah ditetapkan secara jelas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang. Regulasi tersebut mengatur secara rinci mengenai persyaratan teknis kendaraan, batas dimensi, serta kapasitas muatan yang diperbolehkan untuk beroperasi di jalan umum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat pelaksana di Kabupaten Hulu Sungai Utara telah memahami standar dan sasaran kebijakan ODOL tersebut. Sosialisasi mengenai ketentuan dimensi dan muatan kendaraan telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas kepada sopir dan pengusaha angkutan. Namun, meskipun standar kebijakan telah disosialisasikan,

tingkat kepatuhan pengguna kendaraan angkutan barang masih tergolong rendah. Masih ditemukannya kendaraan ODOL di ruas Jalan Brigjen H. Hasan Basri menunjukkan bahwa sasaran kebijakan, yaitu terciptanya lalu lintas yang aman dan terjaganya kualitas infrastruktur jalan, belum sepenuhnya tercapai. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara standar kebijakan yang bersifat normatif dengan realitas implementasi di lapangan. Standar yang jelas belum cukup untuk mengubah perilaku pelaku usaha dan pengemudi tanpa disertai mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten serta dukungan faktor pendukung lainnya.

2. Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan ODOL

Sumber daya merupakan elemen penting dalam menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana pendukung. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan ODOL di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih menghadapi keterbatasan sumber daya, terutama dalam hal jumlah personel pengawasan dan fasilitas pendukung.

Jumlah petugas dari Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas yang terlibat dalam pengawasan ODOL dinilai belum sebanding dengan luas wilayah pengawasan dan intensitas lalu lintas angkutan barang. Selain itu, keterbatasan fasilitas seperti alat timbang kendaraan dan pos pengawasan permanen menyebabkan pengawasan tidak dapat dilakukan secara rutin dan menyeluruh. Kondisi ini berdampak pada lemahnya pengendalian terhadap kendaraan ODOL yang beroperasi di jalan. Temuan ini sejalan dengan pandangan Van Meter dan Horn yang menyatakan bahwa keterbatasan sumber daya dapat menghambat efektivitas implementasi kebijakan. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, kebijakan yang dirancang dengan baik sekalipun sulit untuk mencapai hasil yang optimal.

3. Karakteristik dan Kapasitas Pelaksana Kebijakan

Karakteristik dan kapasitas pelaksana kebijakan menjadi faktor penting dalam menentukan bagaimana kebijakan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat pelaksana kebijakan ODOL di Kabupaten Hulu Sungai Utara, khususnya dari Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas, pada umumnya telah memiliki pemahaman yang baik mengenai tugas dan tanggung jawabnya.

Aparat pelaksana menunjukkan komitmen dalam menjalankan kebijakan melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, dan penindakan terhadap pelanggaran ODOL. Namun, karakteristik pelaksana

yang harus berhadapan langsung dengan pelaku usaha dan pengemudi angkutan barang menimbulkan tantangan tersendiri. Tekanan sosial dan ekonomi dari pelaku usaha sering kali mempengaruhi proses penegakan kebijakan, sehingga dalam beberapa kasus penindakan belum dilakukan secara maksimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kapasitas pelaksana cukup memadai, lingkungan kerja yang kompleks dan penuh tekanan memerlukan dukungan kebijakan yang lebih komprehensif agar pelaksana dapat menjalankan tugasnya secara konsisten dan tegas.

4. Komunikasi Antarorganisasi dalam Pelaksanaan Kebijakan ODOL

Komunikasi antarorganisasi merupakan salah satu variabel penting dalam model Van Meter dan Horn yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi antara Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas Polres Hulu Sungai Utara telah terjalin dengan cukup baik, terutama dalam pelaksanaan operasi penertiban dan kegiatan sosialisasi.

Namun demikian, komunikasi kebijakan kepada kelompok sasaran, khususnya pengusaha angkutan dan sopir, belum sepenuhnya efektif dan merata. Beberapa informan menyatakan bahwa sosialisasi belum menjangkau seluruh pelaku usaha, sehingga masih terdapat kesalahpahaman mengenai ketentuan ODOL dan sanksi yang diterapkan. Kurangnya komunikasi yang intensif dan berkelanjutan menyebabkan pesan kebijakan tidak tersampaikan secara optimal kepada seluruh pihak yang terlibat. Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan tidak hanya harus terjalin antarinstansi pelaksana, tetapi juga harus menjangkau kelompok sasaran secara luas dan berkesinambungan.

5. Disposisi atau Sikap Pelaksana dan Kelompok Sasaran

Disposisi atau sikap pelaksana dan kelompok sasaran terhadap kebijakan ODOL berpengaruh besar terhadap tingkat keberhasilan implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat pelaksana kebijakan pada umumnya memiliki sikap positif dan mendukung terhadap kebijakan ODOL. Mereka memahami pentingnya kebijakan ini dalam menjaga keselamatan lalu lintas dan keberlanjutan infrastruktur jalan.

Sebaliknya, sikap kelompok sasaran, yaitu sopir dan pengusaha angkutan barang, masih menunjukkan kecenderungan kurang mendukung. Meskipun mereka menyadari dampak negatif kendaraan bermuatan berlebih, faktor kebutuhan ekonomi dan tuntutan efisiensi biaya operasional

menjadi alasan utama terjadinya pelanggaran. Sikap pragmatis tersebut menunjukkan bahwa disposisi kelompok sasaran terhadap kebijakan belum sepenuhnya sejalan dengan tujuan kebijakan.

6. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik Lingkungan Kebijakan

Kondisi sosial, ekonomi, dan politik merupakan faktor eksternal yang sangat mempengaruhi implementasi kebijakan ODOL. Di Kabupaten Hulu Sungai Utara, kondisi ekonomi masyarakat yang masih bergantung pada sektor distribusi barang mendorong tingginya aktivitas angkutan barang dengan muatan berlebih. Selain itu, budaya toleransi terhadap pelanggaran lalu lintas dan rendahnya kesadaran hukum turut memperkuat praktik ODOL.

Secara sosial, masyarakat cenderung menganggap kendaraan bermuatan berlebih sebagai hal yang biasa, sehingga tekanan sosial terhadap pelanggaran ODOL relatif rendah. Dari sisi politik dan kelembagaan, implementasi kebijakan ODOL memerlukan dukungan yang kuat dari pemerintah daerah dalam bentuk regulasi turunan, penganggaran, serta penguatan kapasitas kelembagaan. Tanpa dukungan tersebut, kebijakan ODOL sulit diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan.

7. Implikasi Temuan terhadap Implementasi Kebijakan ODOL

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan ODOL di ruas Jalan Brigjen H. Hasan Basri Kabupaten Hulu Sungai Utara telah berjalan, namun belum sepenuhnya efektif. Keterbatasan sumber daya, komunikasi kebijakan yang belum optimal, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat menjadi faktor utama yang menghambat keberhasilan kebijakan. Temuan ini menegaskan relevansi model implementasi kebijakan Van Meter dan Horn dalam menganalisis kompleksitas pelaksanaan kebijakan publik di tingkat daerah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi kebijakan Over Dimension and Over Loading (ODOL) di ruas Jalan Brigjen H. Hasan Basri Kabupaten Hulu Sungai Utara, dapat disimpulkan bahwa kebijakan tersebut telah dilaksanakan oleh instansi terkait, namun belum berjalan secara optimal. Hal ini ditunjukkan oleh masih ditemukannya kendaraan angkutan barang yang melanggar ketentuan dimensi dan muatan, meskipun regulasi telah ditetapkan secara jelas dan upaya sosialisasi serta penindakan telah dilakukan. Dari aspek standar dan sasaran kebijakan, regulasi ODOL telah dipahami oleh aparat pelaksana, namun belum sepenuhnya dipatuhi oleh kelompok sasaran, khususnya sopir dan pengusaha angkutan barang. Pada aspek sumber daya,

keterbatasan jumlah personel pengawasan serta sarana pendukung seperti alat timbang kendaraan menjadi kendala utama dalam pengendalian kendaraan ODOL. Hal ini berdampak pada lemahnya pengawasan dan penegakan kebijakan di lapangan.

Ditinjau dari karakteristik pelaksana kebijakan, aparat pelaksana telah menunjukkan komitmen dan pemahaman yang cukup baik terhadap kebijakan ODOL, namun dihadapkan pada tekanan sosial dan ekonomi yang mempengaruhi konsistensi penegakan kebijakan. Komunikasi antarorganisasi telah berjalan relatif baik, tetapi komunikasi kebijakan kepada kelompok sasaran belum merata dan berkelanjutan, sehingga pemahaman terhadap kebijakan masih terbatas. Selain itu, disposisi atau sikap kelompok sasaran cenderung belum mendukung sepenuhnya kebijakan ODOL karena pertimbangan efisiensi biaya dan kebutuhan ekonomi.

Faktor kondisi sosial, ekonomi, dan politik lingkungan juga berperan signifikan dalam mempengaruhi implementasi kebijakan ODOL. Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap transportasi jalan, budaya permisif terhadap pelanggaran, serta tekanan ekonomi menjadi faktor eksternal yang menghambat efektivitas kebijakan. Dengan demikian, implementasi kebijakan ODOL memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui penguatan sumber daya, peningkatan komunikasi dan sosialisasi, serta perubahan perilaku dan kesadaran masyarakat. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ODOL sangat dipengaruhi oleh interaksi antara berbagai faktor sebagaimana dikemukakan dalam model implementasi kebijakan Van Meter dan Horn. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat agar kebijakan ODOL dapat diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2017). *Dasar-dasar kebijakan publik* (Edisi Revisi). Bandung: Alfabeta.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). New York: Routledge.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang*. Jakarta: Kementerian Perhubungan RI.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nugroho, R. (2017). *Public policy: Dinamika kebijakan, analisis kebijakan, dan manajemen kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.

Winarno, B. (2016). *Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).